

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencapai kinerja yang baik adalah tujuan dari setiap perusahaan karena manajer diharapkan dapat memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan dan menyajikan informasi tentang perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Salah satu ukuran efektivitas dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan adalah kinerja keuangan. Kapasitas perusahaan untuk menerapkan aturan pelaksanaan keuangan secara efektif dan dievaluasi dengan melihat kinerja keuangannya. (Kalsum et al., 2020). Berdasarkan UU No. 19 tahun 2003, perusahaan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang dipisahkan. Salah satu alasan terpenting pemerintah melakukan reformasi BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan.

Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini menjadi sebuah perhatian publik, karena perusahaan BUMN merupakan aset nasional yang secara tidak langsung menjadi milik seluruh rakyat Indonesia dan sebagai aset negara yang sangat penting sebagai sumber pendanaan bagi pemulihan ekonomi. Status perekonomian Indonesia merupakan ukuran terpenting dari kemampuan suatu negara untuk menjaga perekonomian tetap berjalan. Perusahaan BUMN belakangan ini menjadi berita utama karena masalah keuangan, wabah Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan BUMN. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara yang mengalami masalah keuangan, menurut Kementerian

Badan Usaha Milik Negara, masalah keuangan muncul bagi PT Garuda Indonesia sebagai dampak dari wabah Covid-19. (Kompas.com, 2021).

Wabah Covid-19 berdampak buruk pada kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pendapatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selalu rendah dibandingkan biaya operasionalnya yang dikeluarkan. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (16/11/2021), kinerja keuangan PT Garuda Indonesia September 2021 mencatat bahwa total pendapatan sebesar Rp 8,06 triliun. Sementara total biaya operasional yang ditanggung PT Garuda Indonesia hingga September 2021 lebih besar yakni mencapai Rp 18,31 triliun. Struktur biaya perusahaan yang secara umum konsisten menghasilkan kerugian operasional yang tidak sebanding dengan penurunan pendapatan perusahaan yang signifikan akibat wabah Covid-19. Penurunan pendapatan tersebut tercemin dari penurunan jumlah penumpang sebesar 2,3 juta per 30 September 2021 atau 3,3 juta hingga akhir tahun atau hanya 17% dari jumlah penumpang pada tahun 2019 sebelum pandemi. Meski demikian PT Garuda Indonesia menyakini seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai terkendali dan pulihnya mobilitas masyarakat, akan berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN.

Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, serta kontributor yang berharga bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak yang berkepentingan (Sarafina & Saifi, 2017). Investor dapat membuat pilihan investasi terbaik berdasarkan kinerja

keuangan yang akan memberikan informasi tentang situasi perusahaan. Evaluasi kinerja keuangan dapat digunakan dalam lingkungan bisnis untuk mengarahkan kebijakan dan pemilihan perusahaan.

Berikut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaaf ayat 19:

لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَإِيُوفِيهِمْ عَمَلُهُمْ مِمَّا دَرَجَتْ وَلِكُلِّ

Artinya: “dan masing-masing mereka derajadnya menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagimereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Pesan umum ayat tersebut adalah bahwa Allah pasti membalas semua perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah diperbuatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang telah melakukan pekerjaan dengan baik dan benar maka akan mendapatkan hasil yang baik dan bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menerapkan *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan memenuhi tingkat kepercayaan dan harapan tinggi yang dimiliki investor dan pemangku kepentingan atas pelaporan perusahaan. (Ramadhanti, 2018). Setiap pelaku usaha BUMN wajib untuk menerapkan sistem *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan. Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tentang *Good Corporate Governance* perusahaan BUMN serta memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai BUMN agar perusahaan tetap kompetitif baik didalam negeri maupun internasional, seta hidup secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* adalah kebijakan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sekaligus melindungi kepentingan minoritas dan pemegang saham serta menyediakan

sarana untuk menilai keberhasilan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat berdampak pada kinerja keuangan, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* secara efektif, perusahaan dapat mengurangi resiko, meningkatkan kinerja keuangan, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Dewan Direksi bertugas untuk menjalankan perusahaan yang menjadi tolok ukur dari *Good Corporate Governance*. Dewan Direksi mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan berdasarkan tugas, namun dewan direksi perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap keputusan perusahaan. Direksi menetapkan kebijakan perusahaan dan membuat keputusan tentang strategi jangka pendek dan jangka panjang (Sinaga, 2014). Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengawasi seluruh pengelolaan dan kegiatan perusahaan dalam rangka memajukan kepentingan perusahaan dalam mencapai tujuannya (Wardhana, 2017). Menurut penelitian yang Antikasari et al (2020), Azis & Hartanto (2017), Ratna (2019), dan Syafa (2020), menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Velnampy & Nimalthasan, 2013) bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dewan Direksi adalah salah satu metode yang paling efektif dari *Good Corporate Governance* yang kuat karena mengurangi masalah keagenan antara pemilik perusahaan dan manajemen (M. R. Utami & Priantinah, 2019). *Good Corporate Governance* tidak lagi penting untuk semua bisnis, melainkan untuk menjembatani kesenjangan antara investor dan manajemen.

Salah satu komponen dalam mengelola keuangan perusahaan adalah manajemen aset yang efektif dan efisien. Aset adalah kekayaan perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud (Khalidah et al., 2019). Aset dalam perusahaan pada kenyataannya kegiatan perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya aset. Manajemen yang efektif penting untuk memenuhi tujuan perusahaan dari keuntungan maksimum dengan biaya rendah. Rasio Aktivitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajemen aset perusahaan (W. B. Utami & Pardanawati, 2016). Manajemen aset adalah kumpulan tindakan yang diambil untuk mengelola aset secara efektif dan efisien (Ramadhan, 2019). Jika penjualan meningkat dan biaya dikendalikan secara efisien, perusahaan akan mengalami keuntungan besar dan ROA tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh W. B. Utami & Pardanawati (2016), menyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari (Mulyani & Budiman, 2017) menyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Perusahaan BUMN dituntut agar mengarah pada model manajemen aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan, serta transparan bertanggung jawab berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* sehingga tujuan perusahaan tercapai.

Berdasarkan teori keagenan jika principal dan agen memiliki sebuah kepentingan yang berlawanan maka akan terjadi sebuah konflik keagenan (Jensen & Meckling, 1976). *Good Corporate Governance* adalah konsep berbasis teori keagenan yang bertujuan untuk meyakinkan investor bahwa yang

diinvestasikan akan menguntungkan (Ningsih & Dewi, 2016). *Agency Theory* menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (prinsipal pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian (Munte & Irawan, 2020). Perusahaan dengan posisi keuangan yang baik cenderung melihat pertumbuhan pendapatan yang memengaruhi seberapa banyak data keuangan yang tersedia untuk mengurangi biaya agensi.

Berdasarkan dengan uraian diatas, motivasi peneliti untuk melakukan penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya yang terfokus pada aspek kinerja keuangan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Azis & Hartanto, 2017) dan (Wulandari, 2020), hasil penelitian yang berbeda mendorong peneliti untuk mengembangkan model pengujian yaitu pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Direksi) terhadap kinerja keuangan dengan manajemen aset sebagai variabel intervening. Variabel intervening ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar manajemen aset sebagai variabel intervening antara pengaruh variabel *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Variabel intervening merupakan variabel penyela antara variabel independent dengan variabel dependen sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol meliputi leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Peneliti memilih perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI sebagai sektor yang akan diteliti karena perusahaan BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi dan banyak di antaranya beroperasi disektor-sektor

krusial dan strategis, sehingga peningkatan kinerja BUMN harus memberikan implikasi positif terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Manajemen Aset Sebagai Variabel Intervening (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah diperlukan untuk menghindari perluasan dalam mengartikan penelitian ini. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Unsur yang diamati dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance*, Manajemen Aset dan Kinerja Keuangan.
2. Jangkauan peneliti hanya pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
3. Variabel manajemen aset hanya melihat hubungan *Good Corporate Governance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (Dewan Direksi) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah manajemen aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (Dewan Direksi) berpengaruh positif terhadap manajemen aset?

4. Apakah pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Direksi) terhadap kinerja keuangan dengan manajemen aset sebagai variabel intervening?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh faktor *Good Corporate Governance* (Dewan Direksi) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh faktor manajemen aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Direksi) berpengaruh positif terhadap manajemen aset.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Direksi) terhadap kinerja keuangan dengan Manajemen Aset sebagai variabel intervening.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bentuk referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan perusahaan BUMN di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan perusahaan BUMN di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan BUMN, hasil kajian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan untuk membantu menunaikan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.

- b. Bagi Stakeholder, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat.
- c. Bagi masyarakat umum, temuan penelitian ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberhasilan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.